



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
UNIT KERJA : PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARDIYANTO ARIF RAKHMADI**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
3. NHK : **253446**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.550.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/45 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/90 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA BULUNGAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/33 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 202.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000
5. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 45.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. 313.000.000**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	602.944.905
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.712.944.905
III. HUTANG	Rp.	7.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.705.444.905

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.